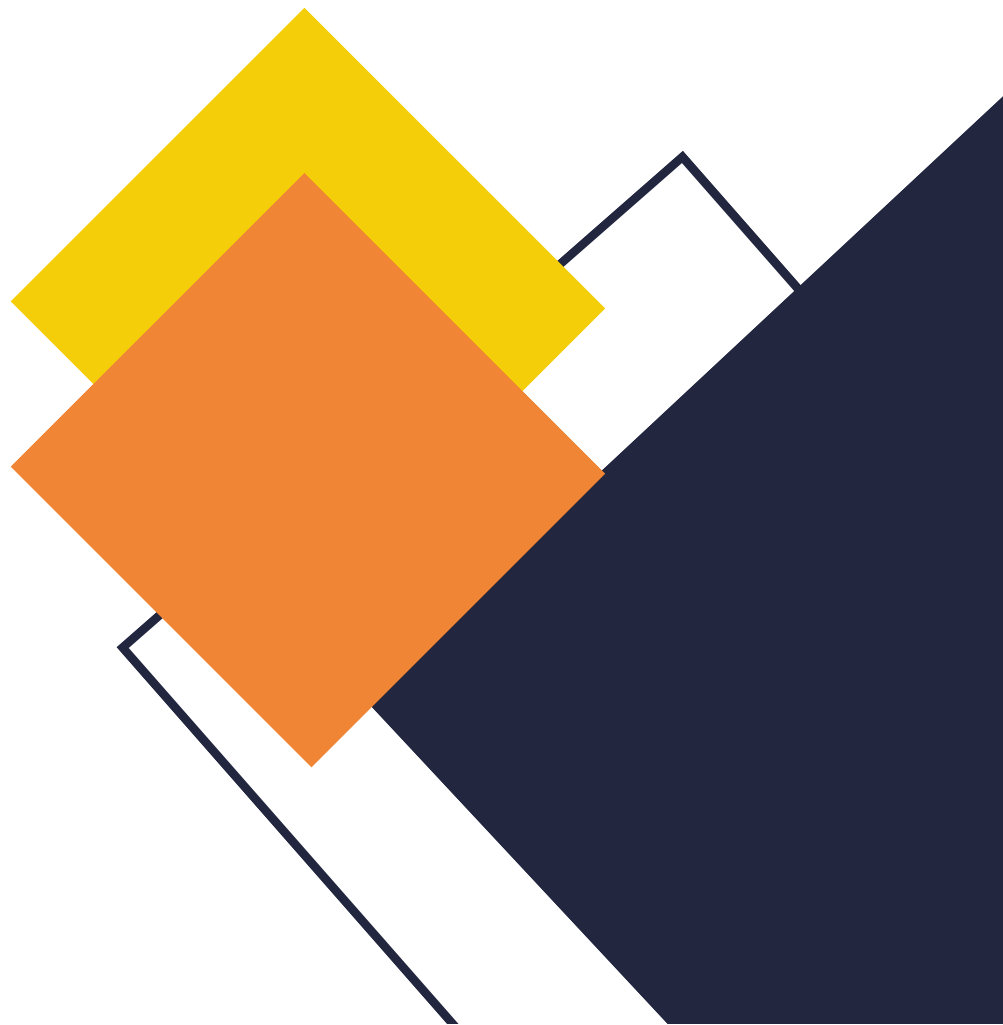


BANK DATA KASUS

Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara

Badan Kepegawaian Negara

2022



Daftar Isi

03

Dasar Hukum

04

janda/Duda

05

Ahli Waris

07

Pernikahan Siri

03

Tindak Pidana

04

Status dan Kedudukan
Kepegawaian

05

Pemberhentian dan
Kenaikan Pangkat
Pengabdian

07

Batas Usia Pensiun

07

TASPEN

07

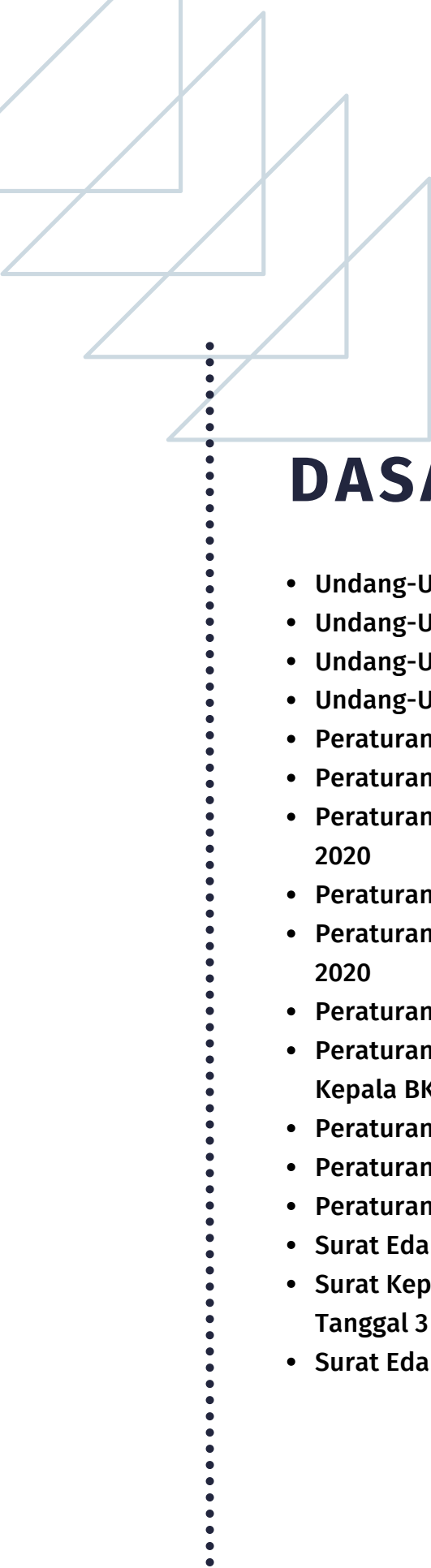
Administrasi

07

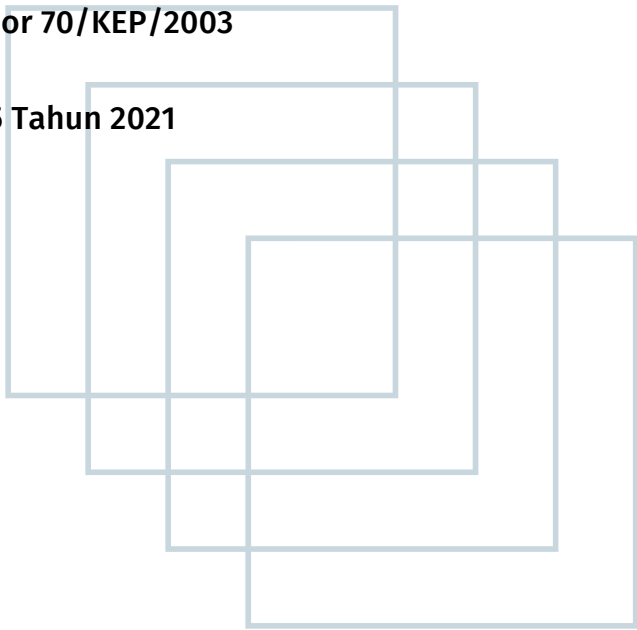
Masa Kerja

07

Masa Persiapan
Pensiun



DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1987
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 j.o 94 Tahun 2020
 - Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 j.o 17 Tahun 2020
 - Peraturan Menteri PAN RB 16 Tahun 2009
 - Peraturan Bersama Mendiknas Nomor 3/V/PB/2010 dan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2010
 - Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002
 - Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018
 - Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020
 - Surat Edaran BAKN Nomor 13 Tahun 1987
 - Surat Keputusan Kepala BKN Nomor 70/KEP/2003 Tanggal 3 November 2003
 - Surat Edaran Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2021
- 

JANDA/DUDA

No	Permasalahan	Rekomendasi
1	Pasangan suami istri berstatus PNS memiliki anak. Kemudian istrinya meninggal dunia dan berhak mendapat pensiun duda. Lalu, PNS pria menikah lagi (pernikahan kedua), sehingga pensiun duda ybs jatuh ke anak dari istri pertama. Bila PNS pria meninggal dunia, bagaimana pembagian pensiun jandanya?	Hak pensiun duda jatuh kepada anak karena PNS pria sudah menikah kembali (dengan syarat anak tsb masih berhak menerima pensiun sesuai ketentuan yang berlaku). Bila PNS pria tsb telah menikah kembali dan meninggal dunia maka pensiun janda jatuh kepada istri kedua dengan memperhatikan bahwa status istri pertama benar-benar PNS. Jika tidak, maka hak pensiun dibagi dua (anak dari istri pertama dan istri kedua).
2	Apabila seorang PNS menikah kembali tanpa sepengetahuan istri pertama pada tahun 2014 dan tidak melapor kepada atasannya, kemudian bercerai dengan istri pertama pada tahun 2018 juga tidak melapor kepada atasan. PNS tersebut meninggal dunia pada Desember 2019. Maka siapakah yang berhak menerima pensiunnya?	Jika secara administrasi ada surat cerai dengan istri pertama, surat keterangan kematian PNS ybs dan akte pernikahan dengan istri kedua yang sah, maka hak pensiun diberikan kepada istri kedua.
3	Apakah suami dari istri seorang PNS yang sudah meninggal mendapatkan hak pensiun duda meskipun sudah meninggalkan rumah dan tidak pernah membiayai keluarga?	Hak ahli waris pensiun dibagi dua, kepada saudara M (suami kedua) dan anak dari suami pertama.
4	Apakah istri kedua yang dinikahi setelah pensiun namun belum pernah diusulkan penambahan keluarga setelah menikah tetap dapat diterbitkan SK Janda Pensiun?	Apabila ybs adalah satu-satunya janda pada saat Pensiunan tersebut meninggal dunia, maka ybs berhak mendapatkan pensiun janda.

AHLI WARIS

Apakah anak yang dilahirkan dari pernikahan secara agama dapat disahkan sebagai anak yang mendapatkan hak pensiun apabila PNS tersebut dapat menunjukkan pengesahan dari pengadilan atau cukup dari kelurahan/kecamatan?

1

Anak tidak bisa disahkan apabila pernikahannya hanya dilakukan secara agama, namun apabila pernikahan orang tuanya beserta status anaknya sudah dilakukan pengesahan secara negara melalui pengadilan, maka anak tersebut dapat diberikan hak pensiun.

2

Seorang PNS wanita tidak memiliki surat cerai dengan suami pertama, menikah dengan suami kedua. Suami pertama tersebut telah menikah dengan wanita lain, PNS tersebut meninggal dunia, dan dari pernikahan suami pertama memiliki anak. Siapakah yang menjadi ahli waris?

Yang menjadi ahli waris pensiun dari PNS wanita tsb adalah anak dari suami pertama, karena suami pertama telah menikah lagi.

Suami dan istri PNS berpisah tanpa surat cerai, kemudian masing-masing mereka menikah dengan orang lain. PNS pria bercerai dengan istri ke dua. Apabila mengusulkan pensiun, siapa saja yang menjadi ahli waris?

3

Ahli waris tetap istri pertama, namun istri pertama yang menikah lagi (tanpa surat cerai dari suami pertama) harus dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat.

4

Seorang PNS pria menikah dengan istri ke 2 tetapi pernikahan tersebut lebih dahulu dilaksanakan dari pada istri pertama bercerai/meninggal dunia. Siapa ahli waris pensiunnya?

Jika masih ada anak yang berhak dari istri pertama, maka hak pensiun dibagi dua (kepada anak dari istri pertama dan istri kedua apabila dinikahi secara sah).

AHLI WARIS

Seorang PNS wanita dibunuh oleh suaminya sendiri, setelah putusan pengadilan suaminya di hukum 10 tahun. Setelah suami bebas dari hukuman, ybs mengajukan pensiun duda. Apakah suami tersebut berhak sebagai ahli waris pensiun?

Jika PNS wanita tersebut memiliki anak, maka penerima pensiun duda diberikan kepada anak sampai dengan suami dibebaskan dari penjara. Jika PNS wanita tersebut tidak mempunyai anak, maka pensiun diberikan kepada suami namun pembayarannya diberhentikan sementara oleh PT Taspen sampai dengan suami dibebaskan dari penjara

5

6

Apakah anak yang belum termasuk di SK Pensiun Janda/Duda masih bisa untuk didaftarkan kembali sekarang?

SK Pensiun PNS dapat diperbaiki sepanjang mencantumkan akta kelahiran anak kandung yang sah yang dilahirkan sebelum PNS meninggal dunia, sehingga tidak perlu melakukan pendaftaran keluarga, karena pendaftaran keluarga dilakukan bagi anak yang dilahirkan setelah pensiun.

Apakah BKN dapat melakukan proses SK Pensiun Janda/Duda untuk ahli waris yang diusulkan oleh PT Taspen meskipun tanpa formulir mutasi keluarga?

Dapat ditetapkan pensiun janda/duda oleh BKN/Kanreg sesuai kewenangan meskipun tanpa melalui formulir mutasi keluarga, sepanjang diusulkan oleh PT Taspen dengan melampirkan salinan sah data pendukung (surat nikah, akta kelahiran anak kandung, SK Pensiun PNS).

7

8

Seorang Pensiunan PNS wanita memiliki suami PNS. Pada saat pensiun anak-anak masuk tanggungan suami sehingga pada SK Pensiun tidak dimasukkan data anak-anak. Ybs meninggal dunia pada tahun 2015 dan suaminya menerima SK Duda tanpa ada data anak-anak. Suami menikah lagi tahun 2016. Tahun 2021 mengajukan usul SK Yatim. Apakah BKN perlu mengeluarkan SK Yatim?

Lakukan revisi/perbaiki SK pensiun duda dengan mencantumkan data anak kedalam SK Pensiun duda. BKN tidak mengeluarkan SK yatim. Saran: suami/istri yang berstatus PNS apabila mengajukan usul pensiun agar mencantumkan data anak-anak yang memenuhi syarat dalam masing- masing SK Pensiunnya.

AHLI WARIS

Surat keterangan dari kepolisian yang menyatakan bahwa seseorang hilang dan tidak diketahui keberadaannya, apakah dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan hak seseorang sebagai ahli waris?

Berdasarkan PP 5 tahun 1987 dan SE BAKN 13 th 1987 maka surat keterangan dari kepolisian dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan hak seseorang sebagai ahli waris, namun apabila ybs diketemukan kembali dalam keadaan sehat, maka ybs melapor kepada PT Taspen untuk meminta haknya sebagai ahli waris.

9

Apakah suami/istri dan anak dari pernikahan siri berhak sebagai ahli waris?

10

Anak yang dilahirkan dari pernikahan siri (secara agama) tidak berhak mendapatkan tunjangan anak. Apabila anak dari pernikahan dengan istri kedua disahkan melalui pengadilan, maka anak tersebut berhak mendapatkan tunjangan keluarga dan terdaftar sebagai ahli waris pensiun.

Apakah BKN dapat melakukan proses SK Pensiun Janda/Duda untuk ahli waris yang diusulkan oleh PT Taspen meskipun tanpa formulir mutasi keluarga?

Dapat ditetapkan pensiun janda/duda oleh BKN/Kanreg sesuai kewenangan meskipun tanpa melalui formulir mutasi keluarga, sepanjang diusulkan oleh PT Taspen dengan melampirkan salinan sah data pendukung (surat nikah, akta kelahiran anak kandung, SK Pensiun PNS).

11

Apakah anak yang lahir dari seorang PNS yang tidak menikah dapat menjadi ahli waris?

12

PNS wanita yang memiliki anak kandung dan tidak menikah sepanjang anak tersebut memiliki akta kelahiran dan disahkan melalui pengadilan maka dapat menjadi ahli waris pensiun dari ibunya.

AHLI WARIS

Bagaimana pengusulan anak-anak yang dilahirkan pada saat usia ibu di atas 45 tahun? Adakah format baku yang digunakan dalam pembuatan Surat Keterangan/Pernyataan dari RS/Puskesmas tempat bersalin?

Tidak ada format baku yang digunakan dalam pembuatan surat keterangan dari rumah sakit atau puskesmas tempat bersalin bagi kelahiran anak-anak dari ibu yang berusia 45 tahun.

13

14

Apakah anak hasil dari pernikahan siri yang disahkan oleh pengadilan berhak sebagai ahli waris?

Bahwa anak kandung dari istri kedua yang lahir sebelum pernikahan secara resmi namun telah disahkan oleh pengadilan maka anak tersebut berhak menjadi ahli waris pensiun jika ibunya meninggal dunia.

15

Apakah anak hasil dari pernikahan siri yang disahkan oleh pengadilan berhak sebagai ahli waris?

Bahwa anak kandung dari istri kedua yang lahir sebelum pernikahan secara resmi namun telah disahkan oleh pengadilan maka anak tersebut berhak menjadi ahli waris pensiun jika ibunya meninggal dunia.

PERNIKAHAN SIRI

Pernikahan dilakukan saat masih aktif sebagai PNS dan istri kedua berkedudukan sebagai PNS. Namun pendaftarannya dilakukan saat telah pensiun dan saat istri pertama sudah meninggal dunia / sudah dicerai.

Apakah pernikahan dengan istri kedua tersebut dapat didaftarkan?

Sesuai dengan ketentuan PNS Wanita dilarang menjadi istri kedua. Oleh karena itu apabila istri kedua masih berstatus PNS ybs harus dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Pendaftaran keluarga terhadap istri kedua tidak dapat dipertimbangkan, namun hanya dapat dicatat (apabila ybs merupakan satu-satunya istri pada saat alm. suami meninggal, maka ybs berhak mendapatkan pensiun janda).

Bagaimana hak-hak pensiun bagi PNS yang melakukan nikah siri?

1. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan pernikahan secara agama/siri tidak dapat diakui pernikahannya secara hukum negara, dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mendapatkan hak-hak kepegawaiannya (tunjangan keluarga dan hak waris pensiun);
2. Agar dapat diakui secara hukum negara, maka pernikahan tersebut harus disahkan melalui Pengadilan Agama dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam. Bagi yang beragama selain Islam maka pernikahan tersebut harus disahkan di Pengadilan Negeri serta dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Apakah anak yang lahir dari pernikahan secara agama (siri) dapat ditetapkan sebagai anak yang berhak menerima hak pensiun dan tunjangan anak?

Anak yang dilahirkan dari pernikahan siri (secara agama) tidak berhak mendapatkan tunjangan anak.

Apabila anak dari pernikahan dengan istri kedua disahkan melalui pengadilan, maka anak tersebut berhak mendapatkan tunjangan keluarga dan terdaftar sebagai ahli waris pensiun.

Pensiunan PNS menikah secara sah menurut hukum agama dan negara dengan istri kedua atas seizin istri pertama. Apakah istri kedua berhak mendapatkan tunjangan istri? Apabila pensiunan PNS meninggal dunia, apakah istri kedua mendapatkan hak pensiun janda?

Istri kedua berhak atas tunjangan setiap bulan dan hak pensiun janda.



TINDAK PIDANA

Pemberhentian karena tindak pidana korupsi tidak bisa diproses pertek pensiunnya karena harus PTDH (tanpa hak pensiun). Bagaimana solusinya apabila sudah PTDH namun ybs menang di PTUN?

Jika keputusan PTUN hanya memenangkan gugatan dalam proses pemberhentiannya tetapi tidak menghapus tindak pidana korupsinya, maka hak pensiun ybs tidak dapat diberikan.

PNS yang terkena permasalahan pidana, dijatuhi pidana, tidak pernah diberhentikan sementara, tidak pernah dijatuhi hukdis dan gaji masih dibayarkan hingga selesai menjalankan pidana.

- 1. Bagaimana isi surat pernyataan pidananya?**
- 2. Apakah masa kerjanya tetap dihitung selama ybs menjalankan pidana tsb?**

Isi surat pernyataan pidana bahwa ybs pernah menjalani pidana. Selama menjalani masa pidana maka tidak dapat diperhitungkan sebagai masa kerja.

Perlu dilakukan pembinaan kepada pengelola kepegawaian terkait PNS yang menjalani hukuman pidana.

Direktorat Pensiun dan Kanreg perlu melakukan Pembinaan, Koordinasi dan

Penyelesaian Masalah ke instansi terkait.

Seorang PNS sudah mendapat persetujuan teknis pensiun BUP kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. Bagaimana tindak lanjut proses pensiunnya?

1. Sebelum ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk diberhentikan sementara sebagai PNS sampai dengan batas usia pensiun
2. Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah dapat diusulkan kembali untuk mendapatkan pertimbangan teknis kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, dan pemberian jaminan hari tua diberikan terhitung mulai tanggal pensiun yang bersangkutan
3. Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah maka kewenangan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS ada pada PPK

Apakah Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin dan Tidak Pernah Dipidana ditandatangani oleh Plt?

Dapat diakomodir asalkan Plt yang menandatangani super hukdis dan super pidananya setara dengan pejabat eselon 2.

TINDAK PIDANA

PNS dalam proses kasasi di MA meninggal dunia. Akan mengajukan pensiun janda untuk ahli warisnya. Apa yang dicantumkan di surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana?

Karena ybs sedang dalam proses kasasi dan meninggal dunia maka dalam surat pernyataan pidana dinyatakan bahwa ybs tidak sedang dalam proses hukuman pidana (seseorang yang meninggal dunia dianggap gugur sanksi hukuman disiplin maupun pidana).

PNS yang dipidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin. Bagaimana isi surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukdis dan tidak pernah dijatuhi pidananya?

Dalam surat pernyataan hukuman disiplin disebutkan tidak dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam satu tahun terakhir.

Dalam surat pernyataan pidana disebutkan ybs sudah pernah dijatuhi hukuman pidana (sesuai dengan Perban 2 tahun 2018).

Saran: perlu dilakukan pembinaan PNS yang terkena kasus pidana seharusnya dijatuhi hukuman disiplin.

Bagaimana perlakuan terhadap PNS yang berstatus DPO? Apakah dapat diberlakukan pemberhentian sementara?

Dapat diberhentikan sementara, mengacu pada surat dari Kejaksaan/Kepolisian.

Bagi PNS yang dipidana penjara selain Tipikor tetapi berdampak bagi organisasi, apakah diberikan Pensiun atau PTDH? Apa saja kriterianya?

- Jika ybs dipidana lebih dari 2 tahun dan berencana maka ybs diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH).
- Jika ybs dipidana lebih dari 2 tahun dan tidak berencana maka dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (PDHTAP).
- Jika ybs dipidana kurang dari 2 tahun dan tidak berencana maka ybs dapat diaktifkan kembali jika ada formasi atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (PDHTAP).
- Jika ybs dipidana kurang dari 2 tahun dan berencana wajib diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (PDHTAP).

BKN sudah menerbitkan Pertimbangan Teknis pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dengan diberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada PNS. Kemudian terbit Surat Perintah Penahanan kepada PNS ybs, bagaimana status perteknya?

Pertek dianggap batal dan tidak berlaku

STATUS DAN KEDUDUKAN KEPEGAWAIAN

Apabila PNS berpindah instansi namun terlambat tindak lanjutnya hingga mencapai BUP (SK Pengalihan sudah terbit, data berada di instansi baru, namun gaji masih dibayarkan instansi lama), instansi mana yang berwenang mengajukan usul pensiun? Bagaimana penyelesaian teknisnya?

Sebaiknya usul pensiun diajukan oleh instansi lama. Jika data pegawai dikembalikan ke instansi lama, maka instansi lama berkoordinasi dengan instansi baru, kemudian instansi lama bersurat kepada BKN (Deputi SINKA) untuk mengubah data ybs di SAPK.

PNS dipidana penjara pada usia 49 tahun dengan masa kerja 21 tahun (putusan pengadilan 1 tahun 4 bulan). Instansi tidak menerbitkan SK pembebasan sementara dan ketika ybs selesai dipidana, kembali bekerja di instansinya. Pada saat ybs berusia 50 thn terbit SK dari PPK tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Instansi mengajukan usulan pensiun ke Kanreg. Bagaimana perlakuan terhadap usulan pensiun tersebut?

Apabila usia ybs sudah lebih dari 50 tahun dan masa kerja lebih dari 20 tahun maka ybs dapat diberikan hak pensiun.

Saran: Perlu dilakukan pembinaan kepada pejabat pengelola kepegawaian tentang mekanisme pemberhentian pegawai yang terkena kasus pidana.

Apakah PNS yang sudah mengajukan permintaan berhenti dengan hormat atas permintaan sendiri karena mencalonkan diri sebagai kepala daerah dapat diaktifkan kembali sebagai PNS?

a. Dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai antara lain disebutkan bahwa Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.

b. Dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, antara lain disebutkan bahwa:

- 1) PNS diberhentikan dengan hormat karena atas permintaan sendiri.
- 2) Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon.
3. Sehubungan hal tersebut, dengan berpedoman sebagaimana ketentuan di atas maka pengaktifan kembali sebagai PNS tidak dapat dipertimbangkan.

PEMBERHENTIAN DAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN

Bagaimana tindak lanjut bagi PNS yang sudah diterbitkan SK Pensiun oleh Kementerian/Lembaganya tanpa berdasarkan Pertimbangan Teknis Pensiun dari BKN?

Instansi tsb diberi peringatan untuk tidak mencetak SK Pensiun sebelum ada nomor dan tanggal Pertimbangan Teknis Pensiun dari BKN.

SK Pensiun yang sudah terlanjur ditetapkan harus dibatalkan, kemudian Instansi mengajukan usul pensiun ke BKN / Kanreg untuk diterbitkan Pertimbangan Teknis Pensiun, apapun jenis pemberhentiannya apabila berhak mendapat pensiun harus berdasarkan pada Pertimbangan Teknis Pensiun yang dikeluarkan BKN.

Apakah Kepala Seksi yang karena adanya penyetaraan jabatan menjadi Sub Koordinator masih dapat diberi kewenangan untuk menandatangani pertek Pensiun dan Pensiun Janda/Duda PNS serta Usulan Janda/Duda usulan Taspen?

Kepala Seksi yang karena adanya penyetaraan jabatan saat ini menjabat sebagai Sub Koordinator masih dapat menandatangani pertek sesuai dengan kewenangannya dan untuk penandatanganan SPPD dilakukan oleh pejabat struktural.

PNS berhenti bekerja karena kondisi kejiwaan sejak 1996 dan mengajukan permohonan berhenti dengan hormat sebagai PNS di tahun 2018. Bagaimana proses penyelesaian perteknya? Apakah menggunakan prosedur pensiun karena berhenti APS atau karena mencapai BUP?

Instansi melakukan peninjauan dan penelaahan kembali mengenai data PNS tersebut, pastikan ada penetapan data dari Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian.

Jika rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin ybs dilaksanakan maka TMT pensiunnya sesuai dengan SK Hukuman Disiplin.

Jika rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin tidak dilaksanakan, maka ybs segera diminta untuk mengajukan APS setelah mendapat rekomendasi dari Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian.

Bagaimana ketentuan usul pensiun SK yang menjadi kewenangan Presiden?

Sesuai ketentuan dokumen asli ditujukan kepada presiden dan tembusan kepada Kepala BKN untuk diterbitkan Pertek Pemberhentian dan Pensiun.

PEMBERHENTIAN DAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN

Terdapat kendala keterlambatan dalam proses persetujuan PPK dan penyampaian usul Pertimbangan Teknis Pensiun karena pemberhentian APS.

Apakah TMT pensiun pada Pertimbangan Teknis Pensiun bisa berlaku surut sesuai dengan TMT pensiun yang disetujui oleh PPK, atau TMT pada pertek tidak boleh berlaku surut dengan kondisi tidak sesuai dengan TMT yang disetujui oleh PPK?

Disarankan usul pensiun APS diusulkan paling lambat 6 bulan sebelum TMT pensiun APS, untuk menghindari terjadinya pertek berlaku surut. Bagi yang sudah terlanjur ditetapkan, TMT Pensiun APS sesuai dengan persetujuan PPK (bisa berlaku surut). Jika di surat persetujuan dari PPK tidak mencatumkan TMT APS, maka TMT pensiun APS disesuaikan dengan permohonan ybs.

Di dalam surat persetujuan pemberhentian APS, PPK harus menyatakan TMT pensiun APS ybs (sesuai Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020).

Apakah pertek pensiun yang sudah ditebitkan dapat dibatalkan, sedangkan data di SAPK sudah tidak ada?

Apabila pengangkatan jabatan fungsional ditetapkan dan pelantikannya dilakukan sebelum TMT Pensiun, maka SK Pensiun ybs dapat dibatalkan dan data di SAPK dapat diaktifkan kembali.

Guru non-S1 yg mempunyai golongan ruang IV/a setelah 01 April 2013, apakah bisa memperoleh KPP ke IV/b? Apa dasar hukumnya?

Guru adalah jabatan fungsional tingkat keahlian maka harus memiliki ijazah minimal S1 dan harus mempunyai sertifikat pendidik. Seharusnya guru non S1 tidak berhak diangkat kedalam golongan ruang IV/a (karena pangkat puncaknya adalah III/d), apabila sudah terlanjur diangkat kedalam golongan ruang IV/a tidak dapat diberikan KPP. (sesuai Permenpan 16 tahun 2009 dan Surat Edaran Kepala BKN Nomor K.26-30/V.294-3/399 tanggal 6 oktober 2010)

Seorang PNS ditetapkan kenaikan pangkat pada tanggal 1 April 2019. Sebelum TMT KP PNS yang bersangkutan meninggal dunia. Bagaimana pengusulan Perteknya?

Terlebih dahulu dibatalkan pertek kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ke Direktur Pengadaan dan Kepangkatan BKN dan membatalkan Surat Keputusan kenaikan pangkatnya.



BATAS USIA PENSIUN

Apakah ada pedoman terkait PNS yang sudah mendekati BUP kemudian diperpanjang lagi karena inpassing/pengangkatan kembali/hal lain?

Sepanjang pengangkatan dalam jabatan fungsional sesuai dengan regulasi maka BUP bisa diperpanjang sesuai dengan BUP jabatan yang baru (dengan syarat SK pengangkatan dalam jabatan fungsional dan pelantikannya ditetapkan sebelum TMT pensiun)

Bagaimana pensiun PNS yang pengangkatan dalam jabatan pengawas sekolah / fungsional lainnya tidak sesuai dengan aturan?

Apabila pengangkatan dalam jabatan fungsional tidak sesuai dengan aturan, maka BUPnya mengacu pada jabatan terakhir sebelum diangkat menjadi pejabat fungsional pengawas sekolah

Seorang PNS dengan jabatan pelaksana guru (belum diangkat jabatan fungsional guru). BUP 58 tahun namun masa kerja belum 5 tahun sehingga tidak mendapatkan hak pensiun. Apabila BUP 60 tahun maka bisa mendapatkan hak pensiun. Berdasarkan kasus tersebut berapa BUP yang bersangkutan? Apa dasar hukumnya?

Karena PNS yang bersangkutan belum diangkat jabatan fungsional guru, maka BUPnya adalah 58 tahun. Jika ybs memiliki masa kerja 4 tahun 9 bulan maka ybs tidak dapat diberikan pensiun (sesuai dengan UU No. 11 Tahun 1969).

Bagaimana TMT pensiun bagi PNS jabatan guru berusia 57 tahun 5 bulan yang mengajukan CLTN? Apakah sebagai jabatan guru atau pelaksana?

Berdasarkan PP 11 Tahun 2017, Pasal 94 ayat 1 : PNS diberhentikan dari Jabatan Fungsional antara lain apabila menjalani cuti diluar tanggungan negara. Ayat 2 : PNS yang diberhentikan dari Jabatan Fungsional antara lain karena alasan menjalani cuti diluar tanggungan negara dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional terakhir apabila tersedia lowongan jabatan. Apabila yang bersangkutan setelah menjalani CLTN dan tidak tersedia lowongan jabatan, sementara usia sudah mencapai 58 tahun atau lebih maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai PNS.

Bagaimana pertek pensiun untuk PNS Guru yang diangkat ke jabatan struktural dan diusulkan pensiun pada usia 60 tahun dengan alasan yang bersangkutan telah kembali menjadi guru tanpa ada SK Pengangkatan Kembali pada jabatan guru?

Ditetapkan pertek pensiun BUP 58 tahun, karena tidak dapat melampirkan SK pengangkatan kembali dalam jabatan guru.



BATAS USIA PENSIUN

Bagaimana status usul kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat PNS Fungsional yang dibebaskan sementara dari jabatan karena tidak mengumpulkan angka kredit dan belum diangkat kembali serta belum juga diberhentikan dari jabatannya?

Untuk dapat menetapkan pensiun yang bersangkutan, maka :

- Mengangkat kembali dalam Jabatan Analis Kepegawaian Madya apabila ternyata yang bersangkutan dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan sehingga BUPnya menjadi 60 tahun;
- Memberhentikan yang bersangkutan apabila tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan sehingga BUPnya 58 tahun

Bagaimana status dan BUP bagi pegawai KPK yang usianya telah memasuki 58 tahun setelah dilantik menjadi ASN?

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa batas usia pensiun Pegawai Tetap Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai berikut:

- 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pegawai Tetap yang memangku Jabatan Struktural Eselon III, Spesialis Madya, Spesialis Muda, serta Jabatan Administrasi; dan
- 60 (enam puluh) tahun untuk Pegawai Tetap yang memangku Jabatan Struktural Eselon I, Eselon II serta Jabatan Spesialis Utama.

Bagaimana status usul kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat PNS Fungsional yang dibebaskan sementara dari jabatan karena tidak mengumpulkan angka kredit dan belum diangkat kembali serta belum juga diberhentikan dari jabatannya?

a. Dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai antara lain disebutkan bahwa Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiunpegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.

b. Dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, antara lain disebutkan bahwa:

- PNS diberhentikan dengan hormat karena atas permintaan sendiri.
- Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendafitar sebagai calon.
- Sehubungan hal tersebut, dengan berpedoman sebagaimana ketentuan di atas maka pengaktifan kembali sebagai PNS tidak dapat dipertimbangkan.



TASPEN

Pada PP 11 Tahun 2017 pasal 283 disebutkan bagi PNS yang dikenakan pemberhentian sementara pada saat mencapai BUP dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diberikan penghasilan 75% dari hak pensiun. Maka siapakah yang berkewajiban membayar penghasilannya (Daerah atau Taspen)?

Sesuai dengan SE Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Nomor 5 Tahun 2021 sebagai tindaklanjut dari Perban 3 tahun 2020 tentang Pemberhentian PNS, bahwa pihak yang akan melakukan pembayaran bagi PNS yang diberhentikan sementara dan telah mencapai BUP namun belum ada keputusan inkraht dari pengadilan adalah PT Taspen.

Apakah ada kebijakan bagi pendaftaran istri/anak yang lebih dari 1 tahun walaupun status DICATAT tetapi isteri/suami/anak dapat memperoleh tunjangan?

Usulan pendaftaran/penambahan keluarga yang sudah lebih dari 1 tahun dari tanggal pernikahan/kelahiran, maka usulan tersebut tidak dapat diproses dan dikembalikan kepada PT Taspen.

BKN hanya menerima pengesahan pendaftaran keluarga yang kurang dari 1 tahun, apabila lebih dari 1 tahun dianggap kadaluarsa.

Bagi usul yang sudah kadaluarsa akan dicatat oleh PT Taspen dan kebijakan selama ini tidak dapat diberikan tunjangan keluarga.

Apa dasar hukum penerbitan Petikan II? Apakah BKN masih bisa menerbitkan SK Petikan II?

Berdasarkan Surat Deputi Nomor 5232/B-HM.05.01/SD/D/2021 tahun 2021, BKN tidak menerbitkan SK Petikan kedua lagi, namun hanya mengesahkan salinan/fotocopy SK pensiun yang dilegalisir BKN/Kanreg BKN yang diusulkan oleh PT Taspen.

Apakah pengesahan pendaftaran keluarga/istri pensiunan (Form A2Pens) bagi yang sudah menikah lebih dari 1 tahun dibolehkan?

Tidak boleh, apabila ada usulan pendaftaran/penambahan keluarga yang sudah lebih dari 1 tahun, maka usulan tersebut dikembalikan kepada PT Taspen.

BKN hanya menerima pengesahan pendaftaran keluarga yang kurang dari 1 tahun.

ADMINISTRASI

Apakah usulan SK Janda/Duda tetap menggunakan blanko SK lama?

SK Pensiun janda/duda pensiunan sudah tidak menggunakan formulir SK yang lama, namun menggunakan contoh SK yang mengacu pada Perban 2 th 2018.

Bagaimana pengelolaan sisa takah pensiun sebelum diberlakukannya aplikasi docu digital?

Jika PT Taspen menyampaikan kepada BKN daftar nominatif data punah maka takah pensiun dapat dipunahkan dengan berkoordinasi ANRI, jika tidak ada data punah maka harus dilakukan pemindaian ke data digital sebelum dipunahkan melalui koordinasi dengan ANRI.

Bagi anak-anak yang dilahirkan setelah ibu diatas 45 tahun, berkas pendukung apa yang sebaiknya dilampirkan?

Berkas yang dilampirkan adalah surat keterangan kelahiran dari rumah sakit atau bidan yang membantu proses kelahiran.

Kapan mulai diberlakukan pengusulan pensiun dengan menggunakan SKP baru?

Usulan tahun 2021 menggunakan SKP sesuai PP No. 46 tahun 2019 dan PermenpanRB No. 8 tahun 2021 Usulan tahun 2022 menggunakan SKP PermenpanRB No. 8 tahun 2021

Kewenangan kanreg untuk menetapkan pertek dan SK Janda/Duda Pensiunan apakah hanya dilihat dari golongan ruang saja atau termasuk dari unit kerja sebelumnya (wilayah kerja Kanreg)?

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKN No. 70/KEP/2003 tanggal 3 Nov 2003 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Regional BKN untuk menetapkan surat keputusan dan persetujuan teknis tentang mutasi kepegawaian PNS dalam ketentuan tersebut di sebutkan bahwa kewenangan Kepala Kantor Regional BKN adalah sampai dengan golongan ruang IV/b kebawah sesuai dengan wilayah kerja.





MASA KERJA

Apabila ada kesalahan perhitungan masa kerja pada SK Kenaikan Pangkat Terakhir, bagaimana solusinya?

Sebaiknya mengikuti perhitungan masa kerja yang tercantum pada SK pangkat terakhir.



MASA PERSIAPAN PENSIUN

Bagaimana proses pensiun untuk PNS yang sudah menjalani MPP dan usulan pensiunnya baru diusulkan setelah mendekati BUP?

Sesuai ketentuan bahwa MPP dapat diberikan maksimal 1 tahun sebelum BUP sesuai jabatan. MPP ybs agar ditinjau kembali dan segera diajukan pensiun BUP.

BKN menghimbau kepada instansi agar dalam implementasi pengelolaan MPP mengacu pada regulasi yang sudah ada (Perban 2 tahun 2019).

PNS dengan jabatan guru disetujui MPP nya. Pada aturan, PNS yang MPP harus melepas jabatan. Apabila lepas jabatan akan berdampak pada BUP PNS tersebut.

Bagaimana teknis pengusulan pertek pensiunnya?

BUP PNS yang menjalani MPP mengacu pada BUP jabatan terakhirnya